

# HUBUNGAN ANTARA OPINI AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) DENGAN KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

**Novita Angelina, Irsutami**

Jurusan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Batam, Batam 29861, email: [novita@polibatam.ac.id](mailto:novita@polibatam.ac.id)  
Program Studi Akuntansi, Politeknik Negeri Batam, Batam 29861, email: [Irsutami@polibatam.ac.id](mailto:Irsutami@polibatam.ac.id)

**Abstrak** – Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara opini audit pada laporan keuangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Kinerja Keuangan Daerah. Dalam mengukur kinerja keuangan daerah diukur menggunakan konsep value for money, data yang dianalisis dalam penelitian ini menggunakan sampel kota/kabupaten di Pulau Sumatera dengan mengacu pada Laporan Keuangan Daerah tahun 2011 yang telah terpublikasi. Analisa data menggunakan Korelasi Pearson dan pengujian menggunakan SPSS 17.0. Hasil penelitian ini membuktikan ; (1) korelasi negatif yang sangat lemah antara Opini audit pada laporan keuangan daerah dengan kinerja keuangan daerah, (2) korelasi positif yang kuat antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kinerja keuangan daerah, (3) korelasi negatif yang cukup kuat antara Dana Alokasi Umum (DAU) dengan kinerja keuangan daerah.

**Kata Kunci** : Opini Audit pada Laporan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Kinerja Keuangan Daerah.

**Abstract** - This research aims to find out the correlation between audit judgments in regional financial report, Local Government Revenue (PAD) and General Allocation Fund (DAU) to a regional government financial performance. In measuring regional income statement to use value for money concept. the data analyzed in this study used a sample of city / county on the island of Sumatra, with reference to the Regional Financial Statements which have been published in 2011. This study uses data analysis with a Pearson correlation of data processing and testing using SPSS 17.0. The result of this study show; (1st) a exceedingly weak negative correlation between audit judgment in regional financial report and regional government financial performance; (2nd) a strongly positive correlation between PAD and regional government financial performance; and (3rd) a negative correlation between DAU and regional government financial performance.

**Keywords** : Audit Judgments in Regional Financial Report, Local Government Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Regional Government Financial Performance.

## 1. PENDAHULUAN

[6] Pemerintah Daerah (Pemda) menegaskan kewenangan Pemda untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan keleluasaan dalam menghimpun dan mengelola sumber-sumber penerimaan berupa: 1) Pendapatan Asli daerah; 2) Dana Perimbangan; 3) Pinjaman Daerah; 4) Lain-lain penerimaan yang sah. Dengan dilaksanakannya otonomi daerah, setiap daerah otonom harus memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri tanpa campur tangan dari daerah lain.

Ketergantungan kepada bantuan pemerintah pusat pun harus sedapat mungkin dikurangi agar tidak

selalu tergantung oleh kucuran Dana Alokasi Umum (DAU) dengan cara meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai implikasinya, peran Pemda dalam penyediaan layanan publik dan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan nasional menjadi semakin besar. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya sistem pemantauan, evaluasi dan pengukuran kinerja yang sistematis untuk mengukur kemajuan yang dicapai Pemda.

Dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat, masalah pengelolaan keuangan daerah merupakan unsur yang tidak terpisahkan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) suatu Pemda sehingga perlu dilakukan pengawasan dan pemeriksaan (audit) yang baik agar tidak terjadi kecurangan (fraud). [5] "Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan

keuangan". Pemeriksaan laporan keuangan yang dimaksud adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh, untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam rangka memeriksa pengelolaan laporan dan tanggung jawab keuangan Negara, yang turut meliputi pendapatan dan belanja pemerintah pusat maupun daerah.

Opini yang dikeluarkan oleh BPK RI berdasarkan audit yang dilakukan di sektor publik, bukan hanya berasal dari audit laporan keuangan saja, melainkan berdasarkan audit kepatuhan dan audit kinerja. Pengukuran kinerja sangatlah diperlukan guna mengetahui sejauh mana organisasi sektor publik menjalankan fungsinya atau pun untuk mengetahui bagaimana sebuah program/pelayanan dijalankan. Kinerja suatu organisasi dinilai baik jika organisasi yang bersangkutan mampu melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya yang rendah. Kinerja yang baik bagi suatu organisasi dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh organisasi yang dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efisien dan efektif. Konsep ekonomi, efisiensi dan efektivitas saling berhubungan satu sama lain. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator penting dalam menilai sukses atau tidaknya pemerintah daerah. Besarnya PAD yang diterima daerah dapat menjadi ukuran dalam menilai kinerja pemerintah daerah, karena semakin besar angka PAD juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mendayagunakan sumber daya dan potensi yang ada pada kewenangannya. [7] untuk pelaksanaan kewenangan daerah (Pemda), pemerintah akan mentransfer Dana Perimbangan (bagian dari bagi hasil pajak dan non pajak, DAU, dan DAK). Dijelaskan kemudian dalam Pasal 10 UU No.33 Tahun 2004 bahwa transfer Dana Perimbangan tersebut terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Dengan DAU, pemerintah daerah diharapkan dapat menggali sumber daya dan potensi keuangan daerahnya sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerahnya.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang hasilnya berbanding terbalik, [12] yang menyatakan terdapat hubungan yang cukup kuat antara opini audit pada laporan keuangan daerah dengan kinerja keuangan daerah yang diukur dengan menggunakan konsep value for money. [3] yang menyatakan tidak terdapat hubungan antara opini audit laporan keuangan daerah dengan kinerja keuangan daerah dengan metode value for money. Untuk hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU), hasil kedua peneliti ini sama, yaitu saling berhubungan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah hasil yang didapat dari penelitian sebelumnya tetap konsisten atau berbeda. Oleh karena itu peneliti mencoba untuk mengangkat variabel ini kembali untuk diteliti.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pendapat Auditor

Pendapat auditor (opini audit) merupakan bagian dari laporan audit yang merupakan informasi utama dari laporan audit. Opini audit diberikan oleh auditor melalui beberapa tahap audit sehingga auditor dapat memberikan kesimpulan atas opini yang harus diberikan atas laporan keuangan yang diauditnya. Terdapat lima jenis pendapat auditor menurut [4] yaitu: a) Pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion). Dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Laporan audit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian diterbitkan oleh auditor jika kondisi berikut terpenuhi:

1. Semua laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas terdapat dalam laporan keuangan.
2. Dalam pelaksanaan perikatan, seluruh standar umum dapat dipenuhi oleh auditor.
3. Bukti cukup dapat dikumpulkan oleh auditor, dan auditor telah melaksanakan perikatan sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk melaksanakan tiga standar pekerjaan lapangan,
4. Laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum di Indonesia.
5. Tidak ada keadaan yang mengharuskan auditor untuk menambah paragraf penjelas atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit.

b) Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas (unqualified opinion with explanatory language). Dalam keadaan tertentu, auditor menambahkan suatu paragraf penjelas atau bahasa penjelas lain dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan auditan. Paragraf penjelas dicantumkan setelah paragraf pendapat. Keadaan yang menjadi penyebab utama ditambahkannya suatu paragraf penjelas atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit baku adalah:

1. Ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi berterima umum.
2. Keraguan besar tentang kelangsungan hidup suatu entitas.
3. Auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
4. Penekanan atas suatu hal.
5. Laporan audit yang melibatkan auditor lain.

c) Pendapat wajar dengan pengecualian (qualified opinion). Pendapat wajar dengan pengecualian diberikan apabila auditee menyajikan secara wajar laporan keuangan, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima secara umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal yang dikecualikan. Pendapat wajar dengan pengecualian dinyatakan dalam keadaan:

1. Tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap ruang lingkup audit.

2. Auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, yang berdampak material, dan ia berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat tidak wajar.

d) Pendapat tidak wajar (adverse opinion). Pendapat tidak wajar diberikan oleh auditor apabila laporan keuangan auditee tidak menyajikan secara wajar laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

e) Tidak memberikan pendapat (disclaimer of opinion). Auditor menyatakan tidak memberikan pendapat jika ia tidak melaksanakan audit yang berlingkup memadai untuk memungkinkan auditor memberikan pendapat atas laporan keuangan. Pendapat ini juga diberikan apabila ia dalam kondisi tidak independen dalam hubungannya dengan klien.

## 2.2 Pendapatan Pemerintah Daerah

Anggaran daerah memiliki peran yang strategis dalam menstimulus pembangunan daerah. Melalui anggaran daerah dapat diperoleh informasi tentang perkembangan ekonomi daerah seperti perkembangan pendapatan daerah dan alokasi anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan. Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, Lain-lain penerimaan yang sah. Komponen terbesar dari pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang termasuk bagian dari dana perimbangan.

## 2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan [7], Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan [7] bahwa PAD bersumber dari:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
4. Lain-lain PAD yang sah, meliputi:
  - i. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak terpisahkan
  - ii. Jasa giro
  - iii. Pendapatan bunga
  - iv. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
  - v. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh daerah.

PAD merupakan salah satu indikator penting dalam menilai sukses atau tidaknya pemerintah daerah. Besarnya PAD yang diterima daerah dapat menjadi ukuran dalam menilai kinerja pemerintah daerah, karena semakin besar angka PAD juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mendayagunakan sumber daya dan potensi yang ada pada kewenangannya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat dari total PAD yang diterima oleh pemerintah daerah pada tahun yang bersangkutan. Rumus perhitungan PAD adalah sebagai berikut:

$$\text{PAD} = \text{Pajak daerah} + \text{Retribusi daerah} + \text{Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang sah.}$$

## 2.4 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi umum merupakan salah satu dari dana perimbangan. Menurut [7], Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

## 2.5 Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. [1] Secara umum, kinerja merupakan prestasi/hasil kerja yang dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Agar pengukuran kinerja dapat dilaksanakan dengan baik, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. [1]

1. Membuat suatu komitmen untuk mengukur kinerja dan memulainya dengan segera.
2. Melakukan pengukuran kinerja sebagai suatu proses yang berkelanjutan ( on-going process)
3. Sesuaikan proses pengukuran kinerja dengan organisasi.

Dalam membangun dan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja di bidang keuangan daerah, dapat menggunakan Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diterapkan sesuai dengan berbagai aspek dan unsur dalam bidang keuangan daerah, yang menyangkut pencapaian kinerja komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah/PAD (khususnya pajak daerah dan retribusi daerah), pendapatan daerah (Bagian Keuangan, Dispenda, dan lainnya). Dengan demikian pencapaian kinerja keuangan daerah dapat dilakukan pengukuran secara rinci dan komprehensif serta dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).

## 2.6 Value For Money

Pengukuran kinerja berdasarkan indikator alokasi biaya (ekonomi dan efisiensi) dan indikator kualitas pelayanan. Dengan demikian teknik ini sering disebut dengan pengukuran 3E yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel ekonomi, efisiensi dan efektivitas : [10].

Ekonomi berkaitan dengan pemerolehan input dengan kualitas tertentu dengan harga terendah. Pengukuran ekonomi melalui rasio antara masukan aktual dengan yang direncanakan [10]. Kinerja pemerintah daerah akan dikatakan ekonomis bila rasionya diatas 100%, atau jumlah realisasi penerimaan melebihi jumlah anggaran yang ditetapkan.

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Anggaran Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}$$

Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu. Efisiensi dapat menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi

pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah akan dikatakan efisien bila rasionya kurang dari 1 atau dibawah 100%, semakin kecil rasio efisiensi berarti rasio kinerja akan semakin baik.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

Efektif adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Dikatakan efektif jika rasio yang dicapai sama dengan 1 atau 100%, namun demikian semakin tinggi rasio efektivitas maka semakin baik.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD Berdasar Potensi Riil}}$$

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung (data sekunder) melalui media perantara, yaitu peraturan perundangan yang berlaku, publikasi seperti data Opini Audit atas Laporan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2011.

Penelitian ini bersumber pada data sekunder yang diperoleh penulis dari dari situs Departemen Keuangan (<http://www.bpk.go.id>) dan situs Kementerian Dalam Negeri (<http://djkd.kemendagri.go.id/>). Sesuai dengan fokus penelitian, maka sampel yang diambil merupakan kabupaten/kota di Pulau Sumatera. Penulis mengambil sampel sebanyak 110 kabupaten/kota dengan metode *purposive sampling*. Kriteria yang digunakan untuk pengumpulan sampel penelitian adalah:

1. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota se Sumatera
2. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang telah mempublikasikan laporan keuangan daerah pada tahun anggaran 2011.
3. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang telah mencantumkan opini audit terhadap laporan keuangan daerah pada tahun anggaran 2011.
4. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kelengkapan data keuangan (Target dan Realiasi masing-masing PAD dan DAU)

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 17. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode uji korelasi ganda dengan batasan signifikan 5% yang berarti harus memiliki tingkat keyakinan 95%. Uji Normalitas bisa dilakukan dengan teknik Kolmogorov-Smirnov. Metode Analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis Pearson Corelation

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Pengujian Instrumen

[9] Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode yang diambil dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka ( $n > 30$ ), maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Biasa dikatakan sebagai sampel besar. Namun untuk memberikan kepastian, data yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak, sebaiknya digunakan uji statistik normalitas. Karena belum tentu data yang lebih dari 30 bisa dipastikan berdistribusi normal, demikian sebaliknya data yang banyaknya kurang dari 30 belum tentu tidak berdistribusi normal, untuk itu perlu suatu pembuktian. uji statistik normalitas yang dapat digunakan salah satu diantaranya Kolmogorov Smirnov. Dalam penelitian ini, data yang diuji sebanyak 110 data. Hasil pengujian seperti yang disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1 Hasil Pengujian Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test					
		opini	TrPAD	TrDAU	kinerja
N		110	110	110	110
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	3.1636	17.2256	19.6155	1.0273
	Std. Deviation	.79594	.90486	.43220	.16362
Most Extreme Differences	Absolute	.418	.069	.116	.539
	Positive	.418	.069	.093	.539
	Negative	-.364	-.036	-.116	-.434
Kolmogorov-Smirnov Z		4.382	.724	1.217	5.652
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000	.672	.103	.000

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Dari hasil pengujian yang telah disajikan pada tabel 4.1, terlihat bahwa Signifikansi data sebesar 0,672 untuk Pendapatan Asli Daerah dan 0.103 untuk Dana Alokasi Umum artinya bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang merupakan tingkat minimum kepercayaan dari 95%. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa data tersebut dianggap berdistribusi normal. Sementara untuk data Opini Audit dan Kinerja Keuangan yang merupakan data kategori tidak bisa dijadikan dasar normalitas karena komponen data yang dimiliki sebagian besar data yang sama. Dalam hal ini opini audit hanya sebagai simbol. Hal ini dikemukakan oleh Feldt & Brennan (1989) bahwa salah satu syarat data dalam pengujian normalisasi adalah kecenderungan komponen atau nilai data yang berbeda (tidak sama) dengan data yang lainnya.

### 4.2 Hasil Pengujian Hipotesis dan Korelasi

Pengujian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara Opini Audit, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU)

dengan Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota dengan menggunakan metode pengukuran Value For Money. Pengujian dilakukan menggunakan metode uji korelasi ganda dengan batasan signifikan 5% yang berarti harus memiliki tingkat keyakinan 95%. Metode Analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis Pearson Corelation.

#### 4.2 Hasil Pengujian Korelasi

		opini	TrPAD	TrDAU	kinerja
opini	Pearson Correlation	1	-.018	-.028	-.105
	Sig. (2-tailed)		.849	.775	.275
	N	110	110	110	110
TrPAD	Pearson Correlation	-.018	1	.180	.221*
	Sig. (2-tailed)	.849		.060	.020
	N	110	110	110	110
TrDAU	Pearson Correlation	-.028	.180	1	-.480**
	Sig. (2-tailed)	.775	.060		.000
	N	110	110	110	110
kinerja	Pearson Correlation	-.105	.221*	-.480**	1
	Sig. (2-tailed)	.275	.020	.000	
	N	110	110	110	110

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

##### 4.2.1 Hipotesis 1 (satu) dan Pembahasan

- Ho : Tidak terdapat korelasi antara Opini Audit pada laporan keuangan daerah dengan Kinerja Keuangan Daerah

- H1 : Terdapat korelasi antara Opini Audit pada laporan keuangan daerah dengan Kinerja Keuangan Daerah

Hasil pengujian dengan menggunakan uji korelasi pearson, menghasilkan antara Opini audit pada Laporan Keuangan Daerah dengan Kinerja Keuangan Daerah yang diukur menggunakan konsep Value For Money mempunyai hasil korelasi sebesar -0,105 (-10,5%) yang menunjukkan bahwa korelasi antara opini audit pada Laporan Keuangan Daerah memiliki hubungan negatif dengan Kinerja Keuangan Daerah. Sedangkan untuk tingkat signifikansinya menunjukkan nilai Sig (0,275) >  $\alpha$  (0,05) maka hipotesis nol diterima, yang artinya tidak terdapat hubungan signifikan antara Opini Audit pada Laporan Keuangan Daerah dengan Kinerja Keuangan Daerah, H1 ditolak. Semakin bagus Opini audit yang diterima oleh kabupaten/kota tidak menjamin kinerja keuangannya bisa dikatakan ekonomis, efektif dan efisien. Kab. Mukomuko adalah salah satu yang mendapat opini audit Wajar Tanpa Pengecualian, namun tidak menunjukkan kinerja keuangan yang ekonomi, efektif dan efisien.

##### 4.2.2 Hipotesis 2 (dua) dan Pembahasan

- Ho : Tidak terdapat korelasi antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Kinerja Keuangan Daerah.

- H2 : Terdapat korelasi antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Kinerja Keuangan Daerah.

Hasil pengujian dengan menggunakan uji korelasi pearson antara PAD dengan Kinerja Keuangan Daerah yang diukur menggunakan konsep Value For Money mempunyai tingkat korelasi sebesar 0,221 (22,1%) yang menunjukkan korelasi antara PAD dengan Kinerja Keuangan Daerah memiliki hubungan positif yang cukup kuat dengan kata lain meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) diikuti dengan meningkatnya kinerja keuangan daerah. Sedangkan untuk tingkat signifikansinya sebesar 0,020 (nilai Sig < 0,05), maka hipotesis nol ditolak, yang artinya tidak terdapat hubungan signifikan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Kinerja Keuangan Daerah, sehingga ada hubungan signifikan variabel bebas dengan variabel terikat, maka pengujian menunjukkan H2 diterima.

##### 4.2.3 Hipotesis 3 dan Pembahasan

- Ho : Tidak terdapat korelasi antara Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Kinerja Keuangan Daerah.

- H3 : Terdapat korelasi antara Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Kinerja Keuangan Daerah.

Hasil pengujian dengan menggunakan uji korelasi pearson antara DAU dengan Kinerja Keuangan Daerah yang diukur menggunakan konsep Value For Money mempunyai tingkat korelasi sebesar -0,480 (-48,0%) yang menunjukkan korelasi antara DAU dengan Kinerja Keuangan Daerah memiliki hubungan negatif, dengan kata lain meningkatnya variabel bebas diikuti menurunnya variabel terikat. Sedangkan untuk tingkat signifikansinya sebesar 0,000 (Nilai Sig < 0,05), maka hipotesis nol ditolak, yang artinya tidak terdapat hubungan signifikan antara Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Kinerja Keuangan Daerah sehingga ada hubungan signifikan variabel bebas dengan variabel terikat, maka pengujian menunjukkan H3 diterima.

## 5. KESIMPULAN

a. Pengujian normalitas dengan Signifikansi data sebesar 67,2% untuk Pendapatan Asli Daerah dan 10,3% untuk Dana Alokasi Umum artinya bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang merupakan tingkat minimum kepercayaan dari 95%. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa data tersebut dianggap berdistribusi normal..

b. "Korelasi antara Opini Audit pada Laporan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Kinerja Keuangan Daerah yang diukur menggunakan konsep *value for money*", dapat diambil suatu kesimpulan hasil pengujian korelasi, bahwa terdapat hubungan yang cukup kuat antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Kinerja Keuangan Daerah yang diukur menggunakan konsep *value for money*. Hal ini disebabkan karena konsep *value for money* sangat penting bagi pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat karena dengan menggunakan

konsep tersebut akan memberi manfaat dalam mengelola dana masyarakat. Sementara korelasi yang sangat lemah antara opini audit dengan Kinerja Keuangan Daerah yang diukur menggunakan konsep *value for money* disebabkan karena audit BPK terhadap laporan keuangan daerah lebih ditekankan pada kewajaran dan ketaatan pada Sistem Pengendalian Internal, dan bukan pada nilai nominal laporan keuangannya.

#### DAFTAR REFERENSI

- [1] Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Erlangga.
- [2] Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Andi.
- [3] Mega, Nuansa. 2010. Hubungan Antara Opini Auditor pada Laporan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Kinerja Keuangan Daerah. Riau: Universitas Riau. Skripsi.
- [4] Mulyadi, 2002. Auditing, Buku Dua, Edisi Ke Enam. Jakarta: Salemba Empat
- [5] Republik Indonesia 2004. Undang – undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta.
- [6] Republik Indonesia 2004. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 (UU No. 32/2004) tentang Pemerintah Daerah menegaskan kewenangan Pemda untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta.
- [7] Republik Indonesia 2004. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 (UU No. 33/2004) tentang pelaksanaan kewenangan daerah (Pemda), pemerintah akan mentransfer Dana Perimbangan (bagian dari bagi hasil pajak dan non pajak, DAU, dan DAK). Sekretariat Kabinet RI. Jakarta.
- [8] Singarimbun, M. Effendi, 2006. Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3S.
- [9] Sugiyono (2008). “Metode Penelitian dan Kuantitatif, Kualitatif dan R &D”. Bandung: Alfabeta.
- [10] Ulum, Ihyaul. 2009. Audit Sektor Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
- [11] Umar, Husein. 2009. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: Rajawali Pers.
- [12] Virgasari, Aviva. 2009. Hubungan Antara Opini Auditor pada Laporan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Kinerja Keuangan Daerah. Malang: Universitas Brawijaya. Skripsi.